

Penataan Kawasan

KLH Minta Reklamasi Pantura Dihentikan



Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH) kembali meminta pengembangan proyek reklamasi dan revitalisasi Pantai Utara Jakarta (Pantura) dihentikan. Pasalnya, pelaksanaannya banyak menimbulkan masalah, seperti rusaknya ekosistem dan sejumlah infrastruktur di Teluk Jakarta.

Deputi I Menteri Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Imam Hendargo Abu Ismoyo mengatakan berdasarkan kajian dan pantauan di lapangan, reklamasi Pantura, terutama di Teluk Jakarta, terindikasi akan banyak menimbulkan masalah, di antaranya konflik penggunaan lahan antara kegiatan yang saat ini berlangsung dan rencana pengembangan di masa depan.

Selain itu, lanjutnya, yang paling menakutkan adalah rusaknya semua ekosistem dan infrastuktur yang ada di Teluk Jakarta. Proyek itu akan mengancam ikan-ikan dan sebagian kehidupan laut di kawasan itu.

"Bukan hanya itu, jaringan kabel, pipa laut, serta pembangkit listrik yang ada akan terganggu, bahkan mungkin akan putus," kata Imam pada lokakarya "Langkah Tindakan Perbaikan Pembangunan Teluk Jakarta" di Jakarta, kemarin.

Iman menabahkan berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, proyek reklamasi tersebut dapat berdampak luas pada kelangsungan Pembangkit Listrik Muara Karang yang berkekuatan 1.670 megawatt (MW), Pembangkit Listrik Priok yang memiliki kekuatan 2.052 MW, dan Pembangkit Listrik Muara Tawar yang memiliki kekuatan 800 MW.

Efek yang bisa ditimbulkan terhadap tiga pembangkit listrik tersebut di antaranya tersumbatnya suplai air pendingin akibat sedimentasi yang meningkat, terganggunya kestabilan struktur konstruksi bangunan pembangkit listrik, serta efisiensi proses pembakaran turbin gas yang terganggu akibat debu kegiatan reklamasi. Jika ketiga pembangkit ini terganggu, berpotensi terjadinya pemadaman listrik pada 2,2 juta konsumen di DKI.